

Judul : Menuju Ketahanan Pangan dengan Subsidi Pupuk
Tanggal : Senin, 22 Februari 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 20

Menuju Ketahanan Pangan dengan Subsidi Pupuk

Belum lama ini DPR melakukan rapat dengan pendapat dengan Kementerian Pertanian. Pemaparan demi pemaparan disampaikan Kementerian Pertanian untuk memperlihatkan kinerja yang telah dilakukan. Hal itu menjadi penting untuk diperhatikan karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar. Kebutuhan akan bahan pangan sudah sepatutnya diperhatikan pemerintah. Rantai distribusi yang kuat disertai pengawasan yang baik dapat membuat pemberian pupuk subsidi menjadi tepat sasaran serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan kualitas produksi hasil pertanian.

Prinsip Pemenuhan Pupuk Bersubsidi

- Tepat jenis
- Tepat jumlah
- Tepat harga
- Tepat tempat
- Tepat waktu
- Tepat mutu

Ketentuan Penerima Pupuk Subsidi Berdasarkan Peraturan Nomor 49 Tahun 2020

- Petani yang bergabung dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (E-RDKK).
- Petani subsektor tanaman pangan dengan lahan paling luas 2 hektare.
- Petani subsektor perkebunan dengan lahan paling luas 2 hektare.
- Petani subsektor hortikultura dengan lahan paling luas 2 hektare.
- Petani subsektor peternakan dengan lahan paling luas 2 hektare.
- Petani melakukan usaha subsektor tanaman pangan pada perbatasan area tanam baru.



Program Kartu Tani

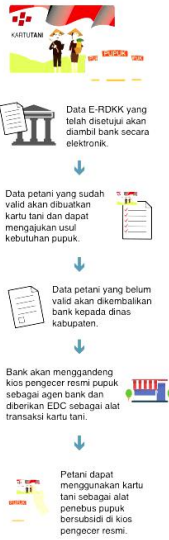
- Akan digunakan untuk pendistribusian pupuk.
- Digunakan untuk perekaman data penerimaan bantuan subsidi pupuk.
- Dalam E-RDKK 13,9 juta orang terdaftar kartu tani.
- Kartu tani yang sudah dicetak 9,3 juta kartu.
- Kartu tani terdistribusi 6,2 juta kartu.
- Kartu tani yang digunakan sebesar 1,2 juta kartu.

- Instansi yang Berada Sama dalam Kartu Tani
- Kementerian Koordinator Perekonomian
 - Kementerian Dalam Negeri
 - Kementerian Badan Usaha Milik Negara
 - Kementerian Perdagangan
 - Kementerian Keuangan
 - Kementerian Pertanian
 - Gubernur dan bupati/walikota

Tata Cara Penyaluran Pupuk Subsidi



Tata Cara Penyaluran Pupuk Subsidi melalui Kartu Tani



Total Kebutuhan Pupuk per Tahun



Alokasi Anggaran Subsidi Pupuk

- Pada 2021 Rp25,27 triliun volume 9 juta ton.
- Pada 2020 Rp29,76 triliun volume 8,3 juta ton.
- Pada 2019 Rp29,50 Triliun volume 8,8 juta ton.
- Pada 2018 Rp28,50 triliun volume 9,5 juta ton.
- Pada 2017 Rp27,76 triliun volume 9,5 juta ton.

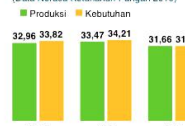
Data Penyaluran Pupuk Subsidi sampai Agustus 2020



Data Produksi Beras dan Padi di Indonesia (Data FAO 2016-2019)



Data Produksi dan Kebutuhan Beras di Indonesia (Juta ton) (Data Neraca Ketahanan Pangan 2019)



Target Produksi Beberapa Bahan Pangan di Indonesia pada 2021



Kenaikan Beberapa Harga Pupuk Bersubsidi 2021 (Berdasarkan Peraturan Nomor 49 Tahun 2020)

	2020	2021
HET pupuk urea	Rp 1.800/kg	Rp 2.250/kg
HET Sp-36	Rp 2.000/kg	Rp 2.400/kg
HET pupuk ZA	Rp 1.400/kg	Rp 1.700/kg

Alasan Kenaikan Harga Pupuk pada 2021

- Penurunan anggaran 2021 sebesar Rp4,6 triliun.
- Dapat mengantisipasi dana sebesar Rp2,579 triliun.
- Tidak pernah ada kenaikan harga HET sejak 2012.



Rekomendasi LIPI Terkait dengan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pangan

- Diperlukan kerja sama antara pemerintah, akademisi, pengusaha, dan NGO serta petani untuk membangun sektor pertanian.
- Diperlukan dukungan kebijakan pemerintah dalam sarana irigasi dan infrastruktur.
- Diperlukan riset lebih baik di bidang pertanian untuk meningkatkan kualitas produksi pertanian.
- Diperlukan kebijakan jangka panjang yang berani menerapkan sistem pertanian berkelanjutan.



Kebijakan Negara Asia Tenggara Penghasil Beras Tertinggi

- Mengeluarkan program *Kitchen of the World*.
- Memfokuskan pembangunan infrastruktur, mekanisasi, dan pengembangan penelitian.



- Membuat kebijakan reformasi bidang pertanian 1986.
- Membebaskan pajak pada bidang pertanian, membuka pasar bebas pertanian, mengembangkan teknologi pertanian, memberikan kredit untuk petani 1988.
- Mempromosikan industri pertanian, migrasi tenaga kerja ke sektor pertanian, mengintegrasikan agrikultur dengan *aquaculture* 1993. Berfokus pada kebijakan ekspor hasil pertanian 1990-sekarang.